

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**PENGARUH DEFISIT APBN TERHADAP JUMLAH UANG  
KARTAL DAN GIRAL (M1) DI INDONESIA  
PERIODE 1998-2004**



**Diajukan Oleh:**

**KMS. CHINTAN SUKMA  
01013120016**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**



351.7207

Sule

P

C-060412

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI**

**PENGARUH DEFISIT APBN TERHADAP JUMLAH UANG  
KARTAL DAN GIRAL (M1) DI INDONESIA  
PERIODE 1998-2004**



R. 14020/14381

**Diajukan Oleh:**

**KMS. CHINTAN SUKMA  
01013120016**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**

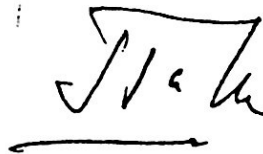
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KMS. CHINTAN SUKMA  
NIM : 01013120016  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : EKONOMI MONETER  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DEFISIT APBN TERHADAP JUMLAH  
UANG KARTAL DAN GIRAL (M1) DI INDONESIA  
PERIODE 1998 - 2004

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL..... KETUA PANITIA



DRS. H. SYAIPAN DJAMBAK, M.Si  
NIP. 131413970

TANGGAL..... ANGGOTA



DRS. ABBAS EFFENDY, MS.i  
NIP. 131412624

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

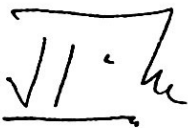
**PENGARUH DEFISIT APBN TERHADAP JUMLAH UANG KARTAL DAN GIRAL  
(M1) DI INDONESIA PERIODE 1998 – 2004**

Di susun oleh :  
**KMS. CHINTAN SUKMA**  
01013120016

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif  
Pada hari Senin, tanggal 14 November 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 14 November 2005

**Ketua**



**Drs. H. Syaipan Djambak, M. Si**  
131413970

**Anggota**



**Drs. Abbas Effendy, M. Si**  
131412624

**Anggota**



**Drs. Harunnurasyid, M. Com.**  
131844026

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan ekonomi Pembangunan**



**Drs. Suhel, M. Si**  
131993979



*"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-  
pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba  
yang membuat rumah, padahal sesungguhnya  
rumah yang paling lemah ialah rumah  
laba-laba kalau mereka mengetahui.  
Dan Perumpamaan-perumpamaan ini  
Kami buat untuk manusia, dan tiada yang  
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu."  
(Al-Ankabut: 41,43)*

*Kupersembahkan untuk :  
Ayah dan Ibuku  
Adikku  
Cha yang koe  
Almamaterku*

## **ABSTRACT**

*This research is intended to analyze the effect deficit of APBN toward cartal money and giral money (M1) in Indonesia. The sampling period is from 1990 until 2004. The data which is from various sources, some of them are Statistics Center Burew, Bank of Indonesian, any literature and books. Analysis used in this research was quantitative , analysis are with regression models. The analysis results, Known R2 is equal to 0,121 or 12,1 %. And the statistic test (t-test) result for deficit of APBN againts cartal money and giral money (M1) in Indonesian period 1990-2004 is significant. The writer hope this paper can became the resources of information that can explain the influence of deficit APBN to cartal money and giral money (M1).*

*Key words : Deficit of APBN, Money supply (M1)*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Defisit APBN Terhadap Jumlah Uang Kartal dan Giral (M1) di Indonesia Periode 1998-2004”**.

Penulisan Skripsi ini disajikan dalam bentuk bab sebanyak empat bab, kajian difokuskan pada masalah pengaruh defisit APBN terhadap jumlah uang kartal dan giral (M1) di Indonesia. Tahapan penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang akan dijelaskan secara singkat di bawah ini.

Pada bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penulisan, teknis analisis yaitu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Bab II berisi tentang gambaran umum APBN dan jumlah uang kartal dan giral (M1) di Indonesia, perkembangan defisit anggaran pemerintah dan perkembangan pengaruh defisit APBN terhadap jumlah uang kartal dan giral (M1) di Indonesia. Pada bab III merupakan bab analisis dengan menggunakan program SPSS untuk mengetahui hubungan antara variabel defisit APBN yang mempengaruhi jumlah uang kartal dan giral (M1) di Indonesia. Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil analisis setelah dilakukan penelitian.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan segalanya baik itu dorongan, bantuan, bimbingan dan segalanya baik semasa penulis dalam melakukan petualangannya dalam menimba ilmu di kampus kuning tercinta sampai menyanggah gelar kehormatan sebagai sarjana ekonomi. Sebuah penghormatan bagi penulis bila diizinkan untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Sang Khalik yang telah memberiku nikmat dan kesempatan untuk menjalani hidup di bumi yang Engkau miliki.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah menjagaku sampai sekarang ini serta memberikan semangat dan fasilitas-fasilitas demi kelancaran terciptanya skripsi ini. I luv U.
3. Saudaraku Ayi, yang selalu *ngeretoki* dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syaipan Djambak ,Msi, selaku Ketua Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Drs. Abbas Effendy, Msi, selaku Anggota Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Dr. Harrunnurrasyid, M.com, selaku Anggota Pembimbing Skripsi.
7. Bapak Drs. Suhel, Msi, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
8. Bapak Dr. Syamsulrijal, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, Asisten serta Karyawan dan karyawanati Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Y' Ita (Sory yuk galak ngerepoti kalu lagi nyusun KRS) dan seluruh staf tata usaha, Karyawan dan Karyawati fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Teman-temanku di Kampoeng 24 Ilir, Eka, Eko, Erik, Pung, dll. Yang galak diajak untuk gaweke skripsiku.
12. Teman-teman bandku, Lando, Fahmi, Alie, Jeber and Ndy, yang tergabung dalam Orkes Melayu yang sampe sekarang masih mengejar Impian.
13. Teman ngeradak ku di kampus Encis (true love never run smooth) dan Ayib (Yang tergabung dalam Spongebob Squarepants) Thanks atas kebersamaannya dalam menjalani hari-hari yang melelahkan di kampus dan juga lawakan serta curhat2annya. Dan juga ISA<sup>2</sup> (teman seperjuanganku di moneter), Adam dan Azhari (berjuanglah atas nama cinta), Jhoni dan Tuja (murid dari Ko Ping Ho), Todes (K'I), Yoga, Gita, Unto, Syamsul, Ikshan, Yudho, Epen, Kecek, Dibod, SEGE (thanks atas contekannya), GREHOL, dan seluruh teman-temanku seangkatan di EP'01 yang telah memberi warna-warni dalam keseharian ku di kampus.
14. Anak EP angkatan 02, (Bolehlah pinter-pinter nian kalian tuh)
15. Anak EP angkatan 03, Vika "Chuwu", Ook, Feith, Uci with Once, Ria, Rateh, Inge, Aji, Aang dll. Thanks 4 eveything.
16. Keluarga besar Ekonomi Pembangunan.
17. Special Thanks to : "Chayank koe", Makasih telah memberiku semangat, perhatian dan membuat hidup lebih hidup. I hope you're the last.



18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan masukannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Indralaya, Maret 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                           | Halaman |
|-------------------------------------------|---------|
| ABSTRAC .....                             | i       |
| DAFTAR ISI .....                          | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                  | iii     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                 | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                      | v       |
| DAFTAR ISI .....                          | ix      |
| DAFTAR TABEL .....                        | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xiii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                  |         |
| I. 1. Latar Belakang.....                 | 1       |
| I. 2. Rumusan Masalah.....                | 7       |
| I. 3. Tujuan penelitian .....             | 7       |
| I. 4. Manfaat Penelitian .....            | 7       |
| I. 5. Tinjauan Pustaka                    |         |
| I. 5. 1. Landasan Teori .....             | 8       |
| I. 5. 2. APBN .....                       | 9       |
| I. 5. 3. Uang Kartal dan Giral (M1) ..... | 14      |
| I. 5. 4. Penelitian Terdahulu .....       | 22      |
| I. 5. 5. Hipotesis .....                  | 25      |
| I. 6. Metodologi Penelitian               |         |
| I. 6. 1 Ruang lingkup penelitian .....    | 26      |
| I. 6. 2 Jenis dan Sumber Data .....       | 26      |
| I. 6. 3 Tehnik Analisa Data .....         | 26      |
| I. 6. 4 Batasan Variabel .....            | 28      |



## **BAB II GAMBARAN UMUM APBN DAN JUMLAH UANG KARTAL DAN GIRAL (M1) DI INDONESIA PERIODE 1998 – 2004**

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II. 1. Perkembangan Jumlah Uang Kartal dan Giral (M1) .....                                                             | 29 |
| II. 2. Perkembangan APBN                                                                                                |    |
| II. 2. 1. Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri .....                                                                    | 37 |
| II. 2. 2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....                                                                     | 41 |
| II. 2. 3. Perkembangan Defisit Anggaran Pemerintah .....                                                                | 44 |
| II.2. 4. Perkembangan Defisit Anggaran Pemerintah (APBN)<br>Dan Jumlah Uang Kartal Dan Giral (M1)<br>Di Indonesia ..... | 47 |
| II. 2. 5. Perkembangan Pengaruh Defisit APBN Terhadap<br>Jumlah Uang Kartal Dan Giral (M1)<br>Periode 1990-2004 .....   | 51 |

## **BAB III PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III.1. Analisis Pengaruh Defisit APBN Terhadap Jumlah<br>Uang Kartal Dan Uang Giral (M1) Di Indonesia<br>Periode 1998 – 2004 ..... | 56 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| IV. 1. Kesimpulan ..... | 60 |
| IV. 2. Saran .....      | 62 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia

Tabel II.1 Jumlah Uang Beredar dalam Arti Sempit (M1) Periode 1998-2004

Tabel II. 2 Komposisi Uang Kartal dan Giral Periode 1990-2004

Tabel II. 3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar (M1)

Periode 1998-2004 (Miliar Rupiah)

Tabel II. 4 Realisasi Penerimaan Negara Periode 1998-2004

Tabel II. 5 Realisasi Pengeluaran Negara Periode 1998-2004

Tabel II. 6 Perkembangan Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah dan

Defisit Anggaran Pemerintah 1998-2004

Tabel. II. 7 Defisit APBN Dan Jumlah Uang Kartal Dan Giral (M1) Di Indonesia

Periode 1998 – 2004

Tabel. II.8 Perkembangan Defisit APBN, Tagihan Pada Pemerintah Pusat dan Jumlah

Uang (M1) di Indonesia Periode 1998-2004



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Kurva Penawaran Uang Keynes

Gambar 1.2. Uji t Statistik

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil perhitungan SPSS antara variabel Defisit APBN dengan Jumlah  
Uang Kartal dan Giral (M1) di Indonesia Periode 1998-2004

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Dipandang dari sudut moneter, yang dimaksud dengan pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang meliputi departemen, lembaga, dan badan yang keuangannya merupakan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penatausahaan keuangan pemerintah dilaksanakan oleh departemen keuangan, c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, yang menempatkan dananya dalam bentuk giro di Bank Indonesia dan bank persero serta dalam bentuk tunai di KPKN dan kantor pos dan giro.<sup>1)</sup>

Secara umum, komponen – komponen yang ada di dalam APBN terdiri dari penerimaan dan hibah, pengeluaran dan pinjaman netto, surplus/defisit, dan pembiayaan. Surplus/defisit adalah selisih Pendapatan Pemerintah dengan Pengeluaran Pemerintah.

Tingkat pertumbuhan yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang relatif lebih merata, keseimbangan pada neraca pembayaran stabilitas dan efesiensi, merupakan landasan utama kehidupan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan terutama pembangunan ekonomi sangat mengharapkan sasaran-sasaran tersebut dapat terwujud.

---

1) Bank Indonesia, Laporan tahunan 2001

Pendapatan yang relatif rendah di negara-negara berkembang menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat adalah rendah dan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari perpajakan juga rendah. Rendahnya tingkat tabungan dan pendapatan pajak menimbulkan suatu masalah yang serius di negara-negara berkembang. Di suatu pihak, usaha mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal yang besar sekali. Akan tetapi dilain pihak kemampuan negara tersebut untuk menyediakan dana modal untuk keperluan mempercepat pembangunan masih terbatas.

Di samping sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembangunan sangat diperlukan adanya sejumlah dana untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan kepada sumber modal yang dapat digunakan untuk pembangunan, usaha pengerahan modal untuk maksud tersebut dibedakan kepada pengerahan modal dalam negeri dan pengerahan modal luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri berasal dari tiga sumber, yaitu : tabungan sukarela masyarakat dan tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua negara berkembang merasakan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah kurang cukup untuk membiayai program pembangunan yang direncanakan dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. Kekurangan ini mungkin dapat diperoleh dari modal luar negeri. Tetapi apabila modal luar negeri tidak dapat diperoleh atau jumlahnya masih belum dapat memenuhi keperluan tersebut, masalah itu dapat diatasi dengan memperlambat laju pembangunan atau melaksanakan program anggaran belanja secara defisit.<sup>2)</sup>, yaitu pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Walaupun dengan program

---

<sup>2)</sup> Hendry: Skripsi, 1998, " Pengaruh Defisit Anggaran Pemerintah Terhadap Laju Inflasi Di Indonesia Selama Repelita IV-VI (1984/85-1997/98)".

anggaran belanja negara secara defisit sulit untuk dilaksanakan, karena hal tersebut dibiayai dengan mencetak uang dan meminjam dari Bank Sentral, banyak negara yang enggan melakukannya. Hal ini disebabkan karena defisit dalam anggaran belanja negara dapat menimbulkan masalah inflasi.

Menengok kembali sistem ekonomi terpimpin pada tahun 1959–1966, perekonomian Indonesia yang semakin buruk ini ternyata bukan saja dikarenakan tidak efektifnya implementasi dari kebijakan moneter, tetapi juga karena membengkaknya defisit Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi setiap tahun. Sistem anggaran yang defisit yang dianut pada waktu itu sebagai peluang untuk membiayai keperluan departemen – departemen dalam setiap anggaran jauh melebihi anggaran yang direncanakan pemerintah sebelumnya, yaitu pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara.

Pada bulan Januari 1950, semua jenis uang yang dikeluarkan oleh negara-negara bagian RIS (Republik Indonesia Serikat) ditarik dari peredaran dan digantikan dengan uang baru yang dicetak dan diedarkan oleh *De Javasche Bank NV*. Dan pada bulan Mei 1950 dilakukan *sannering* (pemotongan uang) yang dikenal sebagai “Gunting Syarifuddin” yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar yaitu dengan menghapuskan nilai mata uang rupiah yang digunting itu sampai 50%. Bahkan pada tahun 1965 defisit anggaran pemerintah sudah mencapai 1.602,88 milyar rupiah (lihat tabel I. 1). Untuk mengendalikan laju inflasi yang meningkat secara terus-menerus maka pemerintah melakukan kebijaksanaan penting di bidang



moneter yaitu: Kebijakan Pengendalian Harga, *Sannering* (pemotongan nilai rupiah dari seribu rupiah menjadi satu rupiah).

Pada periode 1967-1994, pemerintah ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materi maupun spiritual melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dikenal dengan sebutan Repelita. Sejak Repelita I sampai dengan Repelita V, sumber pembiayaan pembangunan kita dalam APBN yang berasal dari luar negeri secara absolut meningkat dari 708,6 milyar rupiah pada Repelita I menjadi 12.251 mliyar rupiah pada akhir Repelita IV. Ini berarti peningkatannya adalah lebih tinggi dari tabungan pemerintah yang meningkat secara absolut dari 569,4 milyar rupiah pada Repelita I menjadi 2.265 milyar pada akhir Repelita IV. Begitu pula persentase ketergantungan sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri untuk sektor publik meningkat dari 55,45 persen pada akhir Repelita I, menjadi 58,77 persen pada akhir Repelita IV.

Meningkatnya ketergantungan sumber pembiayaan dalam APBN pada sumber dari luar negeri ini disebabkan karena menurunnya harga minyak bumi dan terjadinya kemerosotan nilai rupiah terhadap nilai US \$ terhadap valas lainnya menjadikan beban utang luar negeri Indonesia menjadi bertambah berat pada Repelita V.

Dalam kurun waktu 1998 – 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit anggaran. Defisit APBN pada tahun 2002 dapat dikendalikan sebesar 27,7 triliun rupiah atau 93,9 persen diatas target. Pengendalian defisit ini karena perkembangan pendapatan dapat mencapai jumlah yang ditargetkan sebesar 300,2 triliun rupiah atau 0,6 persen dibawah target, sedangkan dalam

persentase terhadap PDB sebesar 18,0 persen sedikit di atas target sebesar 17,9 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya rasio pendapatan dan hibah tahun 2002 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2003, peningkatan belanja negara yang lebih besar daripada peningkatan pendapatan negara menyebabkan beban pemerintah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan defisit menjadi lebih berat dari pada tahun sebelumnya. Defisit APBN yang meningkat pada APBN 2003 diperkirakan memberikan dampak ekspansi rupiah pada uang beredar lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, target defisit dalam APBN jangan sampai mengalami pembengkakan. Karena akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian di Indonesia. Perlu kita garis bawahi, APBN mempunyai tiga fungsi yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Tiga Fungsi utamanya yaitu : Fungsi Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi. Defisit APBN juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian kebijakan makro<sup>3)</sup>.

Persentase pembiayaan dari luar negeri yang terus meningkat membuat beban hutang luar negeri pemerintah terus bertambah. Dengan demikian sejak tahun 1998-2004, anggaran penerimaan dan belanja yang kita tempuh adalah anggaran yang defisit. Apabila pembiayaan dari luar negeri yang selama ini dinilai kurang untuk menutupi anggaran yang defisit, pemerintah dapat melakukan pencetakan uang dan meminjam dari Bank Sentral. Walaupun cara tersebut dapat mengakibatkan laju inflasi semakin meningkat.

---

<sup>3)</sup> Miranda Goeltom, 1997 "*Tinjauan Ekonomi Makro dan Perbankan Indonesia: Profesionalisme dan Sinergi Sumberdaya*", Jakarta.

Pembiayaan defisit anggaran dengan cara mencetak uang dan meminjam dari Bank Sentral mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) terus meningkat.

Hal diatas dapat kita lihat dalam kurun waktu 1998-2004 jumlah uang kartal dan giral (M1) yang merupakan konsep jumlah uang beredar yang dianut Indonesia adalah dalam arti sempit (*narrow money*) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 jumlah uang kartal dan giral (M1) sebesar 101.197 milyar rupiah dan terus meningkat menjadi 253.818 milyar pada tahun 2004. Peningkatan uang kartal dan giral ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Jumlah uang kartal dan giral (M1) akan berpengaruh positif atau negatif terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga harus terus-menerus dipantau perkembangannya agar dapat menghindari efek yang merugikan bagi perekonomian itu sendiri.

Dari fenomena di atas inilah yang menarik untuk diadakan penelitian mengenai pengaruh defisit APBN terhadap jumlah uang kartal dan giral di Indonesia periode 1998 – 2004.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : “ Apakah defisit APBN berpengaruh terhadap jumlah uang kartal dan giral (M1) di Indonesia dalam kurun waktu 1998-2004 ? ”.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh defisit APBN terhadap jumlah uang kartal dan giral di Indonesia periode 1998-2004.

## **I.4. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan dan juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan moneter khususnya mengenai jumlah uang beredar di Indonesia.

## I.5. Tinjauan Pustaka

### I. 5.1. Landasan Teori

Dipandang dari sudut moneter, yang dimaksud dengan pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang meliputi departemen, lembaga, dan badan yang keuangannya merupakan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, komponen –komponen yang ada di dalam APBN adalah:

1. Pendapatan dan Hibah (*Revenue and Grants*)
2. Pengeluaran (*Expenditures*)
3. Keseimbangan primer (*Primary Balance*)
4. Surplus/defisit anggaran (*Overall Balance*), dan
5. Pembiayaan Bersih (*Financing, Net*)

Pos-pos yang berada didalam komponen penerimaan dan hibah adalah :

1. Penerimaan pajak yang terdiri dari :
  - a. Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari : Pajak penghasilan (non migas dan migas), pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
  - b. Pajak Perdagangan Internasional yang terdiri dari : Bea masuk dan pajak ekspor.
2. Penerimaan Bukan Pajak yang terdiri dari : Penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya.
3. Hibah (*Grants*)

Pos – pos yang terdapat dalam pengeluaran adalah :

1. Pengeluaran Pemerintah Pusat yang terdiri dari :
  - a. Pengeluaran Rutin yang terdiri dari : Belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan hutang dan pengeluaran rutin lainnya.
  - b. Pengeluaran Pembangunan yang terdiri dari : Pembiayaan rupiah dan bantuan proyek.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Surplus atau defisit adalah selisih antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah.

## **I. 5. 2. APBN<sup>4)</sup>**

### **A. Pandangan klasik**

Peranan kebijakan fiskal pada masa sekarang sudah meluas diyakini memegang peranan yang sangat penting didalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Pandangan diatas sangat berbeda sekali dengan yang dianut oleh ahli – ahli ekonomi pada zaman ekonomi klasik. Mereka berpendapat bahwa apabila pendapatan pemerintah bertambah tinggi, maka pemerintah dapat membuat

---

<sup>4)</sup> Suparmoko M, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta



pengeluaran yang lebih besar. Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang maka pemerintah juga harus mengurangi pengeluarannya.

## **B. Teori Keynes**

Menurut Keynes, dalam kancah perekonomian moderen, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kategori, yakni;

1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam upayanya mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efesien produksi, contoh pembuatan jalan umum, pertahanan dan keamanan dll.
2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam menyalurkan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar, contohnya memberikan fasilitas-fasilitas dalam kebutuhan masyarakat untuk hidup secara wajar.
3. Peran stabilitatif, yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian memulihkannya jika berada dalam keadaanya disequilibrium, contohnya adalah memulihkan negara dari persoalan – persoalan ekonomi.
4. Peran dinamisatif, yaitu peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi akan lebih cepat tumbuh berkembang dan maju, contohnya adalah memberikan perhatian – perhatian dalam memajukan lembaga – lembaga seperti perbankan dan lain-lain dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keempat peran pemerintah diatas terkait erat dengan jumlah pengeluaran yang akan di alokasikan untuk menjalankan peran-peran tersebut agar berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing

### **C. Teori Wagner**

Menurut Wagner ada beberapa faktor yang menyebabkan pengeluaran Pemerintah selalu meningkat, faktor – faktor tersebut adalah :

1. Tuntutan peningkatan pelindungan keamanan dan pertahanan, faktor ini dapat di contohkan dengan adanya perang dan pemberian fasilitas – fasilitas pengeluaran untuk keperluan perang diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun peran tersebut sudah selesai. Pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara – tentara yang sudah terlalu diangkat sebagai pegawai negeri, dimana mereka ini sebelumnya adalah pengangguran dan tidak menjadi tanggungan pemerintah. Akibatnya baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah negara tetap cenderung meningkat.
2. Kenaikan pendapatan masyarakat, faktor ini terkait erat dengan peran pemerintah sebagai distributor kebutuhan masyarakat secara adil dan wajar. Tuntutan kenaikan gaji pegawai negeri tentu akan membuat pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya penghasilannya maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang – barang dan jasa akan semakin meningkat. Banyak barang – barang dan jasa-jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan perasaran jalan – jalan dan

jembatan – jembatan ini jelas ditangani oleh pihak pemerintah. Meningkatnya penghasilan menurut jumlah barang dan jasa lebih banyak serta kualitas barang dan jasa lebih baik.

3. Adanya urbanisasi yang memerangi perkembangan ekonomi. Urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan dan kesehatan. Urbanisasi biasanya terjadi bersama – sama dengan industrialiasi dan perkembangan ekonomi. Orang mau pindah dari desa ke kota karena banyak hal yang menarik di kota seperti tingkat upah yang lebih tinggi selalu benar dinegara berkembang, karena perpindahan penduduk dari desa ke kota lebih disebabkan oleh adanya tekanan dari desa seperti kurang adanya kesempatan kerja dan belum tentu ada lapangan pekerjaan.
4. Perkembangan demokrasi, perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah–musyawarah, pemungutan–pemungutan suara, rapat–rapat, membayar gaji anggota dan panitia pemilu dan sebagainya. Dan pemerintahlah yang harus mengusahakan ini semua, karena pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dalam masyarakat.
5. Ketidakefisienan birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dalam tahap ini seringkali para birokrat–birokrat kurang berkompeten dalam menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan yang akan menimbulkan tidak efisiennya

pemerintahan negara sehingga sering menimbulkan biaya-biaya yang tidak terduga yang berpengaruh terhadap pengeluaran negara.

Kelima faktor diataslah yang menurut Wagner menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat dalam tahun ketahunnya bagi setiap negara.

#### **D. Teori W.W Rostow dan Musgrave**

Mereka berdua yang merupakan pakar ekonomi pembangunan menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Menurut mereka, pada tahap awal rasio investasi pemerintah terhadap investasi total dengan kata lain rasio investasi terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pemerintahan.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar pertumbuhan dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan, yang menurut pemerintah untuk turun tangan dan mengatasinya.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan semakin maembesar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasioanal akan semakin mengecil. Sementara itu

pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, dimana pada ini juga tuntutan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat dan tentu saja akan berpengaruh terhadap pengeluaran negara.

### **I. 5. 3. Uang Kartal dan Giral (M1) <sup>5)</sup>**

#### **A. Kecepatan Peredaran Uang dan Persamaan Pertukaran (Irving Fisher)**

Irving Fisher mengembangkan suatu teori permintaan uang berdasarkan motif transaksi dimana permintaan akan saldo riil sebanding dengan pendapatan riil dan juga tidak sensitif dengan perubahan tingkat bunga. Kecepatan peredaran uang (  $V$  ) digambarkan dengan tepat sebagai total pengeluaran (  $P \times Y$  ) dibagi dengan jumlah uang (  $M$  ).

$$V = \frac{P \times Y}{M}$$

Fisher mengambil pandangan bahwa secara teknologi dan institutional ekonomi akan mempengaruhi kecepatan peredaran uang secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu, maka kecepatan peredaran uang secara normal dan layak tetap untuk sementara waktu.

---

<sup>5)</sup> Roswita , 2000, *Ekonomi Moneter Teori, Masalah dan Kebijakan*, UNSRI, Palembang.

## **B. Teori Penawaran Uang Klasik**

Dalam teori penawaran uang Klasik menganggap uang yang beredar tercipta seakan-akan perbankan tidak ada kalau ada tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penawaran uang. Teori yang paling sederhana adalah merupakan gambaran dari sistem standar emas, di mana emas merupakan satu-satunya alat pembayaran. Uang yang beredar atau yang ditawarkan di masyarakat dipengaruhi oleh naik turunnya persediaan emas yang ada di tangan masyarakat dan perdagangan luar negeri. Jumlah uang yang beredar turun apabila ada defisit neraca pembayaran dan jumlah uang beredar naik bila surplus neraca pembayaran.

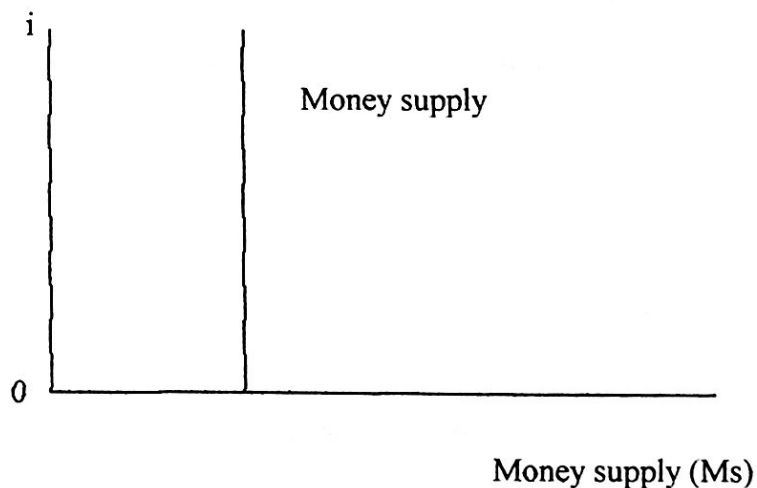
Dalam sistem moneter seperti di atas, uang beredar benar-benar ditentukan oleh proses pasar. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini bank sentral atau sistem perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya jumlah uang yang beredar. Keadaan ini terjadi secara otomatis, di mana tidak ada alasan lagi bagi pemerintah maupun otorita moneter untuk melakukan campur tangan di pasar uang. Penawaran uang akan bertambah atau berkurang tergantung kepada perilaku produsen emas. Pada saat harga emas naik yang berarti harga barang turun, maka para produsen emas akan cenderung menaikkan produksi emasnya, sebaliknya apabila harga emas turun, maka produsen emas akan berkurang dan ini cenderung untuk menghentikan penurunan harga emas, berarti menaikkan harga barang. jadi penawaran uang akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan uang, sehingga harga emas secara otomatis selalu mencapai kestabilan yang berarti juga kebijaksanaan moneter tidak diperlukan.

### C. Teori Penawaran uang keynes

Sampai pada zaman Keynes, teori penawaran uang masih dalam bentuk sederhana. Keynes sendiri kurang memberikan perhatian mengenai mekanisme atau proses terjadinya penambahan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dianggap langsung terjadi di pasar uang, atau dengan kata lain penawaran uang atau jumlah uang yang beredar langsung ditentukan oleh Otoritas Moneter. Dengan sendirinya perilaku jumlah uang beredar tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akibatnya kurva penawaran uang akan tegak lurus pada sumbu mendatar, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

**Gambar I. 1**

#### **Kurva Penawaran Uang Keynes**





#### D. Teori Penawaran Uang <sup>6)</sup>

Penawaran uang (*money supply*) dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang beredar. Dalam perekonomian modern “uang” termasuk bukan hanya uang kartal, tetapi juga uang giral. Uang giral (saldo-saldo rekening koran) diciptakan oleh bank-bank umum sesuai dengan permintaan dari para nasabahnya. Jadi, jumlah uang beredar atau penawaran uang merupakan hasil netto dari perilaku pemerintah (Bank Sentral), bank-bank umum dan masyarakat (khususnya nasabah-nasabah bank). Dari ketiga golongan tersebut pemerintah (bank sentral) mempunyai pengaruh yang besar karena pemerintahlah yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Uang kartal yang diciptakan pemerintah itu sering disebut sebagai “uang inti atau *high powered money* atau *base money*”. (Namun perlu diingat bahwa *high powered money* atau *base money* tidak hanya terdiri dari uang kartal, tetapi juga hutang-hutang moneter dari bank sentral kepada masyarakat dan bank-bank, misalnya saldo-saldo rekening koran bank-bank kepada bank sentral).

$$M = C + D$$

Dimana ;

M : Jumlah Uang Beredar

C : Uang Kartal Yang Dipegang Masyarakat

D : Uang Giral Yang Diciptakan Oleh Bank-Bank Umum

Pembahasan mengenai penawaran uang ini secara ringkas menunjukkan bahwa :

---

<sup>6)</sup> Dr. Boediono, *Teori Moneter*, BPFE, Yogyakarta 1989. hal. 63

1. Pemerintah bisa secara langsung mempengaruhi uang inti ( $B$ ), misalnya dengan pencetakan uang baru.
2. Pemerintah hanya bisa mempengaruhi jumlah uang beredar ( $M$ ) melalui  $B$  dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempengaruhi reserve ratio ( $r$ ), misalnya dengan penentuan cash ratio, pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. Selebihnya jumlah uang beredar ( $M$ ) ditentukan oleh perilaku masyarakat umum dan bank-bank, yang merupakan faktor diluar pengaruh langsung pemerintah. Penawaran uang ( $M$ ) mempunyai elastisitas terhadap perubahan tingkat bunga maupun tingkat harga.

Dalam suatu perekonomian negara, peranan bank sentral dalam hal ini. Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Sasaran dari kebijakan ini adalah penekanan laju inflasi.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan moneter, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi laju inflasi dengan cara mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga atau kredit.

Adapun instrumen pelaksanaan kebijaksanaan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar adalah :

1. **Operasi Pasar Terbuka**, yaitu kebijaksanaan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga.

Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menjual surat berharga. Sebaliknya, jika pemerintah ingin menambah jumlah

uang beredar maka bank sentral akan membeli surat berharga pemerintah yang ada ditangan masyarakat.

2. **Cadangan Minimum**, yaitu kebijaksanaan bank sentral untuk mengubah besarnya cadangan minimum. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka bank sentral akan mengeluarkan kebijaksanaan untuk menurunkan ketentuan besarnya RR. Hal ini dilakukan agar kemampuan bank umum untuk melakukan ekspansi kreditnya lebih besar. Dan jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menaikkan ketentuan *excess reserve* bank-bank umum berkurang sehingga kemampuan untuk mengadakan ekspansi kredit berkurang juga.
3. **Tingkat Diskonto**, yaitu kebijaksanaan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum apabila bank umum meminjam dana dari bank sentral. Pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum yang kemudian dana tersebut akan dipinjamkan lagi oleh bank umum kepada masyarakat.

Faktor Yang Menyebabkan Pertambahan Jumlah Uang Yang Beredar :

Dalam penawaran uang modern dikatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi perkembangan uang beredar melalui 2 cara :

1. Dengan mempengaruhi koefisien *money multiplier*.
2. Dengan mempengaruhi perkembangan dari pada *base money*.

Dalam kenyataannya faktor yang biasanya lebih menentukan perkembangan jumlah uang beredar adalah perubahan *base money* itu sendiri. Umumnya perubahan

*base money* sangat menentukan perubahan jumlah dari uang yang beredar, sedangkan tindakan moneter dari pemerintah dan bank sentral sangat mempengaruhi perkembangan *base money* atau uang inti (B).

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah melalui otorita moneter mempengaruhi *base money*, maka harus diketahui dahulu dari mana *base money* itu tercipta, ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana *base money* itu tercipta :

1. Adanya Pencetakan uang baru. Pencetakan uang baru ini diciptakan untuk menutupi adanya defisit anggaran yang tidak dapat ditutupi dengan kebijakan lain, sehingga untuk kekurangan anggaran yang diperlukan diciptakanlah *base money*.
2. Melalui pemberian pinjaman oleh bank sentral kepada bank sentral kepada bank lain dalam hal kredit liquiditas atau juga kepada lembaga-lembaga di dalam masyarakat berupa kredit langsung akibatnya saldo rekening koran/giro milik bank-bank dan lembaga lainnya bertambah, maka *base money* yang ada di bank sentral bertambah.
3. Adanya transaksi yang terjadi dengan luar negeri. Dalam hal ini yang dianggap kegiatan ekspor dan impor hanyalah perusahaan swasta saja, jadi apa yang terjadi dengan cadangan devisa selalu diimbangi dengan jumlah *base money*, sehingga jumlah uang beredar naik secara keseluruhan dari ketiga hal diatas yang menyebabkan perubahan *base money* dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$B = CG + CB + NFA$$

CG = saldo rekening pada bank sentral

CB = saldo rekening giro ,masyarakat dan lembaga keuangan yang ada pada Bank Sentral

NFA = *net foreign assets* dari Bank Sentral

Pada saat uang baru dicetak maka CG akan meningkat dan bila kredit liquiditas dan kredit langsung bank sentral meningkat maka CB akan meningkat dan bila surplus neraca pembayaran maka kenaikan NFA akan terjadi dan apabila CG serta CB tergabung maka hal ini disebut Domestic Credit.

$$DC = B - NFA$$

#### E. Batasan Anggaran Pemerintah <sup>7)</sup>

Metode pembiayaan pengeluaran pemerintah dijelaskan dengan penjelasan yang disebut batasan anggaran pemerintah, yang tertulis dibawah ini : Defisit Anggaran Pemerintah ( DEF ), yang sama dengan kelebihan pengeluaran pemerintah (G) lebih besar dari penerimaan pemerintah (T), harus sama dengan perubahan *Monetary Base* ( $\Delta MB$ ) dan perubahan obligasi pemerintah yang dipegang masyarakat ( $\Delta B$ ), secara matematis, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$DEF = G - T = (\Delta MB) + (\Delta B)$$

---

<sup>7)</sup> Miskhin, Fredrick S. (1994), *The Economics of money, Bankng and Financial Markets*, Harper Collins Publisher, 3<sup>rd</sup> ed.

Batasan anggaran pemerintah selanjutnya menyatakan dua pernyataan penting : “ jika defisit pemerintah dibiayai dari kenaikan obligasi yang dipegang oleh masyarakat, tidak ada pengaruhnya pada *monetary base* (MB) dan selanjutnya pada penawaran uang. Tetapi jika defisit tersebut tidak dibiayai dari kenaikan saham yang dipegang masyarakat, maka *monetary base* (MB) dan penawaran uang akan meningkat”.

Elemen yang mempengaruhi proses ini adalah defisit anggaran yang kokoh. Jika proses hanya berlangsung secara sementara saja maka tentu tidak akan menyebabkan inflasi. Dimana pada waktu terjadi defisit anggaran, akan ada kenaikan pada jumlah uang yang berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut, dan akibatnya akan terjadi permintaan agregat akan naik sehingga meningkatkan harga.

#### **I. 5. 4. Penelitian terdahulu**

Hendry (1998) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Defisit Anggaran Pemerintah Terhadap Laju Inflasi Di Indonesia Selama Repelita IV-VI (1984/85-1997/98) mengatakan bahwa defisit anggaran pemerintah berpengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. Dan selanjutnya akan mempengaruhi laju inflasi..

Apabila suatu negara mengalami defisit anggaran pasti akan mengalami kekurangan dalam membiayai pembangunan. Untuk menutupi defisit tersebut ada beberapa cara untuk membiayainya, yaitu dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan berikut :

1. Meminjam dari masyarakat, badan-badan keuangan diluar bank-bank komersil, bank-bank komersil dan Bank Sentral.
2. Mecetak uang

Memperbesar tersedianya dana untuk pembangunan dengan meminjam dari bank – bank komersil dan bank sentral serta mencetak uang dapat menimbulkan masalah inflasi.

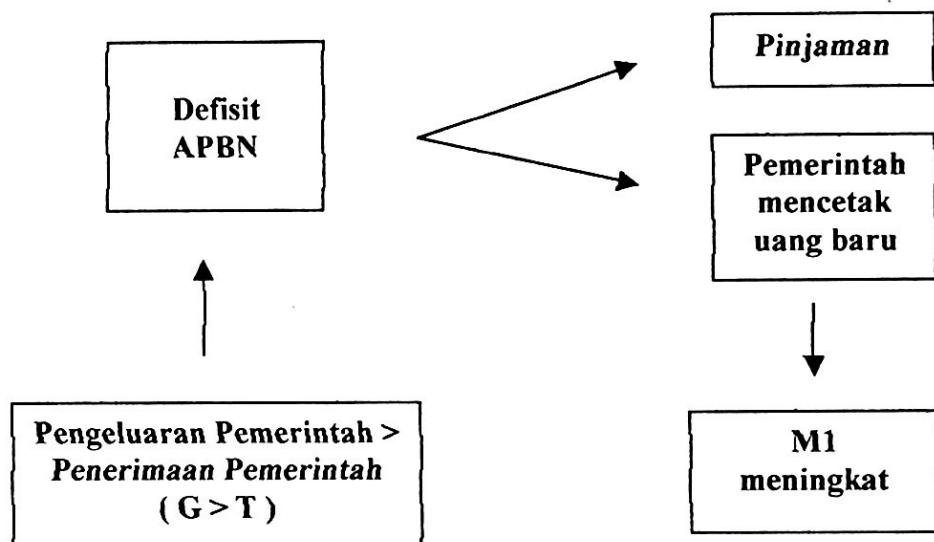
Miranda Goeltom dalam jurnalnya yang berjudul “ Kebijakan Ekonomi Makro dengan Intergrasi Pasar Uang dan Globalisasi : quo vadis kebijakan fiskal” menjelaskan bahwa semakin tinggi defisit anggaran domestik, maka akan terjadi ekspansi moneter yang besar pula. Dengan demikian kebijakan anggaran domestik akan mempunyai efek *inflationer* jika sektor riil tidak berkembang mengimbangi pertumbuhan uang beredar. Kasus Indonesia pada oil boom merupakan contoh yang paling menarik dihubungkan dengan kondisi di atas. Pada saat itu, terjadi pertumbuhan uang beredar sangat tinggi (sekitar 20-25%) yang mengakibatkan inflasi . Salah satu sumbernya adalah defisit anggaran domestik yang besar yang dibiayai dengan *foreign surplus* yang berasal dari penerimaan migas dan bantuan luar negeri. Dampak moneter dari anggaran sebetulnya dapat dikurangi jika pemerintah melakukan sterilisasi dengan meningkatkan deposit pemerintah pada Bank Sentral atau mempercepat pembayaran hutang. Cara pertama dilakukan oleh pemerintah, tetapi penambahan deposit ini dijadikan oleh Bank Indonesia sebagai sumber penciptaan kredit likuiditas yang bersubsidi.

**Tabel I. 1**  
**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia**

| <b>P E N E R I M A A N</b>                                                          | <b>P E N G E L U A R A N</b>                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Penerimaan Dalam Negeri</b><br>1. Penerimaan Migas<br>2. Penerimaan non-Migas | <b>C. Pengeluaran Rutin</b><br>1. Belanja Pegawai<br>2. Belanja Barang<br>3. Subsidi Daerah Otonom<br>4. Bunga dan Cicilan    Hutang<br>5. Lain-lain |
| <b>B. Penerimaan Pembangunan</b><br>1. Bantuan Program<br>2. Bantuan Proyek         | <b>D. Pengeluaran Pembangunan</b><br>1. Pembiayaan Rupiah<br>2. Bantuan Proyek                                                                       |
| <b>Total = (A + B)</b>                                                              | <b>Total = (C + D)</b>                                                                                                                               |



### Skema Hubungan Defisit APBN Terhadap Jumlah Uang M1



#### I. 5. 5. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diduga bahwa defisit APBN berpengaruh secara positif terhadap Jumlah uang kartal dan giral (M1).

#### I.6. Metodologi Penelitian

##### I.6.1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarah lagi, maka perlu suatu batasan dalam penelitian. Ruang lingkup pada penulisan ini adalah jumlah uang kartal dan giral dan APBN di Indonesia periode 1998-2004.

### **I.6.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang memiliki kaitan dengan ruang lingkup penulisan ini, serta dilengkapi dengan berbagai buku bacaan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan.

### **I.6.3. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana dalam hal ini akan dilihat pengaruh dari defisit APBN terhadap jumlah uang kartal dan giral di Indonesia. Adapun sarana yang digunakan adalah model regresi linier sederhana seperti di bawah ini :

$$Y = a + b_1X_1$$

Dimana:

**Y** = Jumlah Uang kartal dan giral (M1)

**X<sub>1</sub>** = Defisit APBN

**a** = konstanta

**b** = parameter

Adapun hipotesa yang diajukan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh defisit APBN terhadap jumlah uang kartal dan giral adalah sebagai berikut:

$$H_0 = 0$$

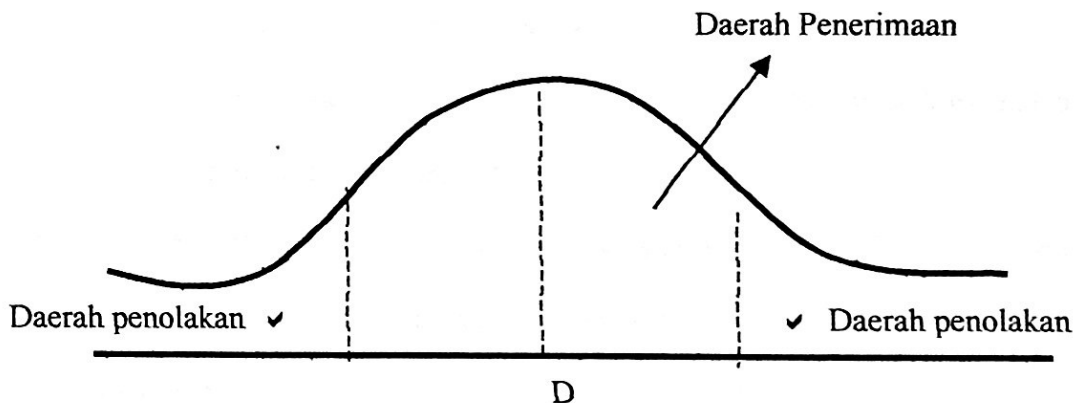
$$H_a \neq 0$$

$H_0$  merupakan hipotesa bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan  $H_a$  sebagai hipotesa alternatif menyatakan terdapat hubungan.

Uji T dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Bila nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel pada tingkat kepercayaan tertentu, maka hipotesis nol ditolak dan ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen.

**Gambar 1.2**

**Uji T Statistik**



Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan. Untuk pengujian F ini digunakan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_a \neq 0$  (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent. Sedangkan untuk pengujian keeratan antar variabel digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan koefisien korelasi ( $r$ ).

#### 1.6.4 Batasan variabel

1. Jumlah uang beredar ( $M1$ ) adalah jumlah seluruh uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan demand deposit yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank komersil (  $M1 = C + DD$  )
  - Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral dalam bentuk uang kertas dan uang logam.
  - Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersil dalam bentuk demand deposit.
2. Defisit APBN adalah selisih antara Penerimaan Pemerintah dengan Pengeluaran Pemerintah. Dimana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan*, Berbagai Edisi.
- Bank Indonesia, *Statistik dan Keuangan Ekonomi*, Berbagai Edisi.
- Miranda Goeltom, 1997, *Tinjauan Ekonomi Makro dan Perbankan Indonesia*:
- Profesionalisme dan Sinergi Sumberdaya, Jakarta.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, 1995, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Roswita AB, 2000, *Ekonomi Moneter : Teori, Masalah dan Kebijakan*”, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Dr. Boediono, 1989, *Teori Moneter*, BPFE, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 1995, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boediono, 1989, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta.
- Hendry: Skripsi, 1998, *Pengaruh Defisit Anggaran Pemerintah Terhadap Laju Inflasi Di Indonesia Selama Repelita IV-VI ( 1984/1985 – 1997/1998)*, Universitas Sriwijaya.
- Miskhin, Fredrick S, 1994, *The Economics of money, Bankng and Financia lMarkets*, Harper Collins Publisher, 3<sup>rd</sup> ed.
- Suparmoko M, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE Yogyakarta.